

Efektivitas Penggunaan Transaksi Elektronik Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang

The Effectiveness Of Electronic Payment Transactions For Land And Building Tax In Enhancing Local Government Revenue Of Tangerang Regency

Muhammad Zaki Naufal^{a*}, Sampara Lukman^b, Marja Sinurat^c
Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia^{a,b,c}
^aahmad.naufal8@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of electronic transaction utilization for Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) in Tangerang Regency. The digitalization of PBB-P2 payments is part of the regional financial governance reform agenda and the implementation of government transaction elektronification. Although electronic payment systems have been made available and show an increasing trend in transaction values, manual transactions still dominate in practice. This condition indicates that the effectiveness of electronic PBB-P2 transactions has not yet been fully optimized and is influenced by various institutional, technological, and public participation factors. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data collection techniques include in-depth interviews with officials of the Regional Revenue Agency of Tangerang Regency and taxpayers, field observations, and documentation studies. Data analysis was conducted by referring to organizational effectiveness theory to understand the implementation process, measure effectiveness and influencing factors, as well as identify efforts to enhance the effectiveness of electronic PBB-P2 transactions. The findings show that the use of electronic PBB-P2 transactions in Tangerang Regency has been relatively effective and has contributed positively to increasing local revenue, although it has not yet reached optimal levels due to the low rate of public adoption. Factors influencing effectiveness include institutional support, cross-sectoral cooperation, readiness of information technology infrastructure, as well as public digital literacy and participation. Efforts to increase PAD are carried out through comprehensive digitalization of the tax collection system, data-based intensification and extensification, innovation in payment channels, strengthening socialization and digital literacy, and reinforcing fiscal supervision and transparency. This study recommends strengthening cross-sectoral coordination, enhancing human resource capacity, and implementing continuous socialization strategies so that electronic PBB-P2 transactions can become a strategic instrument for sustainable local revenue improvement.

Keywords: *Effectiveness, Electronic Transactions, Land And Building Tax, Increasing Local Own-Source Revenue, Regional Tax Digitalization*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan transaksi elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang. Digitalisasi pembayaran PBB-P2 merupakan bagian dari agenda reformasi tata kelola keuangan daerah dan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Meskipun sistem pembayaran elektronik telah tersedia dan menunjukkan tren peningkatan nominal transaksi, dalam praktiknya transaksi manual masih mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas transaksi elektronik PBB-P2 belum sepenuhnya optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, teknologi, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang dan wajib pajak, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori efektivitas organisasi guna memahami proses, mengukur efektivitas dan faktor yang memengaruhi, serta upaya peningkatan efektivitas transaksi elektronik PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang telah berjalan cukup efektif dan berkontribusi positif

terhadap peningkatan PAD, namun belum optimal karena masih rendahnya tingkat adopsi masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi dukungan kelembagaan, kerja sama lintas sektor, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta literasi dan partisipasi masyarakat. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui digitalisasi total sistem pemungutan pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis data digital, inovasi kanal pembayaran, penguatan sosialisasi dan literasi digital, serta penguatan pengawasan dan transparansi fiskal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi sosialisasi yang berkelanjutan agar transaksi elektronik PBB-P2 dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan PAD secara berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Transaksi Elektronik, PBB-P2, Meningkatkan PAD, Digitalisasi Pajak Daerah.

1. Pendahuluan

Sistem pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistis, namun seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut mulai berubah dengan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Perubahan ini didorong oleh semakin kompleksnya kebutuhan serta permasalahan masyarakat yang memerlukan solusi yang lebih responsif dan berbasis lokal, sehingga desentralisasi menjadi semakin penting.

Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara lebih mandiri (Jazim Hamidi, 2011). Menurut (Halim dan Mujib, 2009), desentralisasi dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi fiskal memiliki peran paling krusial karena berkaitan langsung dengan kapasitas keuangan daerah dalam membiayai kebijakan dan program pembangunan. Menurut (Prawirosetoto dalam Pujiati, 2008) desentralisasi fiskal merupakan proses pendelegasian tanggung jawab serta pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan daerah, yang mencakup baik aspek penerimaan maupun pengeluaran. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal harus didukung oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama keberhasilannya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan pembangunan di wilayahnya. Namun, tanpa dukungan keuangan yang memadai, fungsi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data perbandingan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2025, terlihat adanya variasi tingkat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah di masing-masing wilayah. Kabupaten Tangerang menunjukkan kinerja yang relatif kuat dibandingkan sebagian besar daerah lain, dengan realisasi PAD sebesar Rp5.382,55 miliar dari total pendapatan daerah Rp8.789,31 miliar. Capaian tersebut menghasilkan rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 61,24 persen, yang menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi kedua tertinggi setelah Kota Tangerang Selatan.

Capaian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pendapatan daerah Kabupaten Tangerang telah bersumber dari PAD, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang cukup baik. Bahkan, realisasi PAD Kabupaten Tangerang tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga lebih tinggi dibandingkan beberapa kota besar lainnya di Banten, seperti Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Kota Tangerang Selatan yang memiliki rasio PAD tertinggi sebesar 64,50 persen, masih terdapat ruang peningkatan

bagi Kabupaten Tangerang dalam memperkuat struktur pendapatan daerahnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa optimalisasi sumber-sumber PAD, termasuk melalui pemanfaatan sistem transaksi elektronik Pajak Bumi dan Bangunan, masih memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Saat ini, banyak peralihan yang dilakukan terhadap jenis pajak yang mana pajak pusat berubah menjadi pajak daerah, hal ini diharapkan pelaksanaan pengelolaannya dapat lebih optimal dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat yang jelas lebih memahami keadaan wilayah daerah tersebut. Salah satu pajak yang dialihkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertera pada Undang-undang nomor 01 tahun 2022. Pengalihan pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Berawal dari perubahan ini, PBB-P2 diharapkan menjadi sumber yang besar bagi PAD suatu daerah (Muhammad Farid Fadli: 2022).

PBB-P2 merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal negara yang memiliki karakteristik unik, karena sebagian besar penerimaannya dikembalikan ke daerah untuk mendukung pembangunan. Landasan hukum PBB-P2 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. PBB-P2 memiliki keterkaitan yang erat dengan Pendapatan PAD, di mana semakin tinggi kontribusi dan realisasi penerimaan PBB-P2, maka semakin besar pula peningkatan PAD suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rio Rahmat Yusran & Dian Lestari Siregar:2017) dalam studi berjudul Pengaruh BPHTB dan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PBB-P2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, dalam praktiknya, realisasi penerimaan PBB-P2 sering kali tidak mencapai target yang ditetapkan. Beberapa kendala yang menyebabkan fluktuasi hingga penurunan penerimaan PBB-P2 telah diidentifikasi dalam penelitian (Witiya dan Santoso,2014) yang menemukan delapan faktor utama penyebab rendahnya realisasi PBB-P2, antara lain SPPT yang tidak tersampaikan kepada wajib pajak, kelalaian wajib pajak dalam membayar PBB-P2, persoalan administrasi perpajakan, tingkat pengetahuan yang rendah, minimnya kesadaran wajib pajak, medan wilayah yang sulit dijangkau, ketidaktepatan dalam pencatatan data, serta kondisi ekonomi wajib pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses pemungutan pajak. Menurut (Fitrah:2024) penggunaan sistem transaksi elektronik di tingkat daerah mampu mempercepat administrasi perpajakan serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Fitran Sah, Novi Winarti, and Ardi Putra:2024). Sejalan dengan pendapat tersebut, Djuanda mengungkapkan bahwa penerapan sistem elektronik dapat mengurangi potensi kesalahan administratif, sekaligus mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga berdampak positif terhadap pengawasan penerimaan pajak oleh pemerintah. Hal ini diperkuat oleh temuan Pratama, yang menyoroti bahwa sistem elektronik dapat membantu mencegah kebocoran pendapatan daerah akibat kesalahan manusia maupun praktik penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan data pertumbuhan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, Kabupaten Tangerang menunjukkan adanya peningkatan nilai piutang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, besaran piutang PBB tercatat sebesar Rp735.772.594.123,00 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,149 persen. Nilai tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi Rp768.314.774.614,00, disertai dengan pertumbuhan piutang sebesar 9,800 persen.

Peningkatan piutang kembali terjadi pada tahun 2025, di mana besaran piutang PBB mencapai Rp809.297.823.801,00 dengan laju pertumbuhan sebesar 15,657 persen. Kecenderungan meningkatnya nilai dan persentase pertumbuhan piutang ini menunjukkan bahwa akumulasi tunggakan pajak terus bertambah setiap tahunnya. Data tersebut menggambarkan adanya dinamika dalam pengelolaan piutang pajak yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan pengendalian pertumbuhan piutang PBB di Kabupaten Tangerang.

Peningkatan piutang ini tidak hanya mencerminkan potensi penerimaan yang tertunda, tetapi juga dapat menjadi beban bagi pengelolaan keuangan daerah karena berisiko mengurangi realisasi riil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks inilah digitalisasi pembayaran pajak, khususnya PBB-P2, diharapkan mampu memberikan solusi. Kemudahan akses pembayaran melalui kanal digital yang lebih luas, cepat, dan transparan diyakini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak serta menekan laju pertumbuhan piutang.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk mengkaji sejauh mana penerapan transaksi elektronik PBB-P2 dapat berkontribusi terhadap optimalisasi PAD sekaligus penelitian ini juga penting dilakukan guna mendukung rencana aksi ETPD 2025-2027 yang telah disahkan oleh TP2DD. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk kebijakan peningkatan efektivitas layanan PBB-P2 di masa depan serta dapat menghasilkan analisis yang komprehensif serta simultan mengenai implikasi efektivitas transaksi elektronik PBB-P2 terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tangerang.

Efektifitas diartikan sebagai ukuran yang menyatakan seberapa jauh sasaran (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektifitas sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan (Mesiono:2018). Sedangkan, menurut (Siagian:2014) memberikan definisi sebagai berikut: efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan transaksi elektronik pada PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Muhammad Rijal Fadli:2021). Penelitian ini akan dilaksanakan di instansi di Kabupaten Tangerang yaitu BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah), serta Wajib Pajak PBB di Kabupaten Tangerang. Partisipan penelitian mencakup Kepala Badan Pendapatan Daerah, pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, pengguna sistem transaksi elektronik PBB (wajib pajak), serta ahli kebijakan fiskal dan ekonomi daerah yang diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas dan dampak penerapan sistem transaksi elektronik dalam pengelolaan PBB untuk meningkatkan PAD.

3. Hasil Dan Pembahasan

Efektivitas Penggunaan Transaksi Elektronik PBB dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tangerang

Hasil penelitian ini didasarkan pada kerangka efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Siagian, yang digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai penggunaan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. Indikator pertama hingga kelima menekankan pentingnya aspek perencanaan dan perumusan kebijakan. Kejelasan tujuan menjadi titik awal agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai arah penerapan transaksi elektronik PBB-P2, yakni tidak hanya sebagai inovasi pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan PAD. Tujuan yang jelas kemudian perlu didukung oleh strategi pencapaian yang terarah, sehingga implementasi kebijakan tidak berjalan secara parsial atau sporadis. Strategi ini diwujudkan melalui proses analisis dan perumusan kebijakan yang matang, yang mampu menjembatani tujuan peningkatan PAD dengan langkah-langkah operasional di lapangan. Dalam konteks ini, perencanaan yang matang dan penyusunan program yang tepat menjadi krusial, karena kebijakan transaksi elektronik PBB-P2 harus diterjemahkan ke dalam program konkret yang mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaksana maupun diterima oleh masyarakat sebagai wajib pajak.

Selanjutnya, indikator keenam hingga kedelapan lebih menekankan pada aspek pelaksanaan dan pengendalian kebijakan. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja menjadi prasyarat utama agar sistem transaksi elektronik dapat berfungsi secara optimal, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi hingga dukungan sumber daya manusia. Pelaksanaan yang efektif dan efisien mencerminkan sejauh mana program yang telah direncanakan benar-benar dijalankan sesuai tujuan tanpa pemborosan sumber daya dan waktu. Di sisi lain, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan transaksi elektronik PBB-P2 berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjadi mekanisme pembelajaran bagi organisasi dalam memperbaiki kelemahan yang muncul. Dengan menggunakan seluruh indikator Siagian tersebut, pembahasan penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penggunaan transaksi elektronik PBB-P2 sebelum memasuki pemaparan hasil penelitian secara empiris, sehingga hasil yang disajikan nantinya dapat dipahami dalam kerangka konseptual yang utuh dan sistematis.

Kejelasan Tujuan

Penggunaan transaksi elektronik tentunya harus memiliki kejelasan tujuan yang telah ditentukan sebagai wujud pencapaian sehingga target dan pemahaman WP terhadap transaksi elektronik PBB-P2 yang dicanangkan oleh Kabupaten Tangerang dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah saat penulis melakukan penelitian “Secara umum Kabupaten Tangerang telah menerapkan digitalisasi pajak daerah agar mempermudah pelayanan dan tentunya kami selaku pemerintah daerah menginginkan pencapaian target dari sektor pajak dapat berkontribusi dengan maksimal, sehingga dapat membantu pembangunan daerah dengan baik”.

Hal ini sejalan dengan yang tercantum dalam data Renstra Bapenda (Renstra Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029, II-48) yang menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan digitalisasi pajak di Kab. Tangerang adalah untuk mempermudah pelayanan dan juga meningkatkan pencapaian target dari sektor pajak. Lebih lanjut, Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang saat penulis melakukan penelitian:

“Target Pemda Kab. Tangerang dalam program transaksi elektronik terkhusus dalam pembayaran PBB-P2 harus semaksimal mungkin dioptimalkan dan masyarakat sebagai Wajib Pajak mengerti penggunaan transaksi elektronik perpajakan, sehingga pendapatan daerah dapat dengan optimal dan juga mengurangi beban kerja ASN Pemda Kab. Tangerang”.

Efektivitas transaksi elektronik PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target penerimaan daerah, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak terhadap sistem pembayaran digital. Optimalisasi target penerimaan yang diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat dinilai mampu mendorong peningkatan PAD sekaligus menciptakan efisiensi kerja aparatur pemerintah daerah. Dalam perspektif teori efektivitas Siagian, kondisi ini mencerminkan pentingnya kejelasan tujuan, penerimaan sasaran program, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien. Kondisi tersebut tercermin dalam hasil wawancara dengan informan, yang menyatakan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tangerang dari sektor PBB-P2 masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah yang menyampaikan:

“Pendapatan daerah Kab. Tangerang dari sektor PBB-P2 masih kurang optimal sehingga perlu adanya penentuan target yang lebih maksimal. Karena pembangunan Kabupaten Tangerang salah satunya bergantung dari sektor PBB-P2, sehingga bagi ASN Kabupaten Tangerang harus dapat bekerja keras dalam menjaga optimalisasi penggunaan transaksi elektronik PBB-P2”.

Hal ini selaras dengan data sekunder dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendokumentasikan piutang PBB dari tahun ke tahun. Pada TA 2022, piutang PBB-P2 di Kabupaten Tangerang tercatat sebesar Rp735.772.594.123,00 (LKPD Tahun 2022, hlm 119). Pada TA 2023, piutang PBB-P2 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp768.314.774.614,00 (LKPD Tahun 2023, hlm 119). Pada TA 2024, piutang PBB-P2 bertambah lagi menjadi Rp 809.297.823.801,00 (LKPD Tahun 2024, hlm 126). Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan PBB-P2 masih belum optimal.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Selanjutnya dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentunya perlu adanya sebuah strategi yang akan diterapkan agar pelaksanaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang tepat sasaran. Strategi dalam penelitian ini dipahami sebagai serangkaian langkah terencana dan terarah yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi, dukungan sumber daya, serta dinamika lingkungan eksternal. Strategi tidak hanya mencakup penetapan arah dan sasaran program, tetapi juga mencakup penentuan metode pelaksanaan, pembagian peran antar aktor yang terlibat, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Guna menjawab pertanyaan bagaimana strategi sosialisasi dan edukasi wajib pajak dilakukan agar masyarakat dapat beralih ke sistem elektronik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah saat penulis melakukan penelitian: “Ya, strategi kami memberikan penyuluhan dan diskusi kepada WP agar mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai PBB-P2 secara online tersebut”.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan transaksi elektronik PBB-P2 menitikberatkan pada pendekatan edukatif melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi kepada wajib pajak. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi digital masyarakat terhadap mekanisme pembayaran PBB-P2 secara daring, sehingga wajib pajak tidak hanya mengetahui keberadaan sistem transaksi elektronik, tetapi juga mampu menggunakannya secara mandiri. Dalam perspektif teori efektivitas Siagian, pendekatan ini mencerminkan adanya kesesuaian antara strategi pelaksanaan kebijakan dengan kondisi dan karakteristik sasaran program. Peningkatan pemahaman wajib pajak sebagai kelompok sasaran diharapkan dapat mendorong penerimaan kebijakan, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, strategi penyuluhan dan diskusi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang.

Sementara itu Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang menambahkan bahwa “Kami sebagai aparaturnya wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pembayaran PBB-P2 secara online”. Pernyataan ini menggambarkan adanya komitmen kuat dari Bapenda guna memberikan edukasi yang lebih dalam pada masyarakat terkait pembayaran PBB-P2 secara daring. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa Bapenda tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan perilaku wajib pajak melalui peningkatan literasi digital dan pemahaman perpajakan, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan transaksi elektronik PBB-P2. Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah menyatakan bahwa “Kami turun langsung kepada masyarakat mengenai program pembayaran secara online pada program PBB-P2, agar WP lebih memahami dan mendapatkan informasi lebih mengenai tujuan dari program ini”.

Secara keseluruhan penjelasan diatas menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dilaksanakan secara aktif, partisipatif, dan

berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai sasaran program. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif melalui keterlibatan langsung aparaturnya dalam memberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pembayaran PBB-P2 secara elektronik. Dalam perspektif teori efektivitas Siagian, strategi ini mencerminkan upaya memperkuat kejelasan strategi pencapaian tujuan dan meningkatkan penerimaan sasaran program, sehingga kebijakan digitalisasi pembayaran PBB-P2 tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan terjadi perubahan perilaku wajib pajak ke arah penggunaan sistem pembayaran elektronik secara mandiri, yang pada akhirnya mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang.

Dampak dari strategi sosialisasi dan edukasi tersebut mulai terlihat pada capaian penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tangerang. Hal ini tercermin dari pernyataan informan yang mengungkapkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor PBB-P2 mengindikasikan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program pembayaran PBB-P2 secara elektronik, sehingga masyarakat mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih tertib. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah “Sementara itu Jika kita melihat dengan terus meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang melalui PBB-P2 mensinyalir bahwa masyarakat sudah semakin mengetahui program ini sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk dapat membayar Pajak”.

Proses Perumusan Kebijakan

Kebijakan Program Pembayaran PBB-P2 secara elektronik ini dipahami sebagai suatu instrumen kebijakan publik yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk memodernisasi sistem pemungutan pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi bagi wajib pajak, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Transisi dari pembayaran secara manual menuju transaksi elektronik tentu saja tidak dadakan atau perlu bertahap. Hal ini merupakan penerapan kebijakan transaksi elektronik yang berbasis pada hasil evaluasi atau penelitian sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah saat penulis melakukan penelitian “Kebijakan penerapan transaksi elektronik tidak dilakukan secara spontan, tetapi berbasis pada hasil evaluasi dan penelitian internal terhadap efektivitas sistem manual sebelumnya”. Sejalan dengan hal tersebut Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang juga menjelaskan bahwa “Kebijakan ini merujuk pada kajian bersama Bappeda, Bank BJB, dan Bapenda terkait efektivitas sistem pembayaran pajak digital”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan program pembayaran elektronik PBB-P2 dirumuskan berdasarkan proses analisis dan perumusan kebijakan yang sistematis dan berbasis data. Kebijakan tersebut tidak lahir secara instan, melainkan melalui evaluasi terhadap kelemahan sistem pembayaran manual serta kajian bersama lintas instansi yang melibatkan Bappeda, Bank BJB, dan Bapenda.

Selaras dengan hal tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah mengungkapkan bahwa “Kebijakan elektronifikasi transaksi lahir dari evaluasi sistem manual yang tidak efisien. Kami melakukan penelitian internal dan benchmarking ke beberapa daerah sebelum memutuskan untuk menerapkannya di Tangerang”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan elektronifikasi transaksi PBB-P2 di Kabupaten Tangerang dirumuskan melalui proses analisis yang matang dan berbasis pada evaluasi kinerja sistem sebelumnya. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah dengan:

“Transformasi digital di sektor publik, khususnya di bidang perpajakan daerah, merupakan bagian dari agenda *smart governance* dan *digital fiscal management*. Bapenda Kabupaten Tangerang sejak tahun 2021 telah menerapkan sistem transaksi elektronik (*e-Transaction*) sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola penerimaan pajak dan retribusi daerah”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem transaksi elektronik oleh Bapenda Kabupaten Tangerang tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknis semata, tetapi merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih luas menuju *smart governance* dan pengelolaan fiskal digital (*digital fiscal management*). Sementara itu dalam waktu dan tempat yang terpisah bahwa Kepala Subbidang Pelaporan dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang mengemukakan pendapatnya yakni “Implementasi *e-Transaction* ini dilatarbelakangi oleh evaluasi sistem manual yang menunjukkan ketidakefisienan, keterlambatan setoran pajak, serta lemahnya transparansi pelaporan”.

Perencanaan

Program yang dicanangkan dan yang akan dilaksanakan tentunya melalui perencanaan yang matang dengan masukan dari semua elemen. Menyikapi hal tersebut maka pertanyaan yang harus dijawab adalah sejauh mana perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk digitalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tangerang dapat disusun. Menyikapi hal tersebut Kepala Badan Pendapatan daerah menyatakan bahwa “Penyusunan perencanaan digitalisasi pembayaran PBB-P2 dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui dua horizon waktu jangka pendek (operasional dan integratif) serta jangka panjang (transformasional dan analitik)”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan digitalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tangerang disusun secara terstruktur, berjangka, dan berorientasi pada keberlanjutan program. Pembagian perencanaan ke dalam horizon jangka pendek dan jangka panjang mencerminkan adanya kejelasan arah kebijakan serta tahapan implementasi yang sistematis, mulai dari pemenuhan kebutuhan operasional dan integrasi sistem hingga transformasi dan pemanfaatan data secara analitik.

Gambaran perencanaan diatas tertuang dalam data Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Tahun 2025-2029. Mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, Bapenda akan terus menetapkan target dari tujuan “Meningkatnya Nilai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah” dengan indikator indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) (Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, hlm. III-1). Pada Tabel 3.1 Renstra Bapenda mencatat bahwa indikator ini ditetapkan dari

tahun 2025-2029 (Renstra Bapenda Tahun 2025-2029, hlm. III-3). Pada tahun anggaran 2025 target indeks ETPD sebesar 91. Pada tahun anggaran 2026, target indikator dinaikan menjadi 92. Pada tahun 2027 target indikator dinaikan lagi menjadi 93 hingga pada tahun 2029 target indeks ETPD menjadi sebesar 96. Penetapan target tersebut menjelaskan bahwa perencanaan digitalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tangerang dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja yang jelas.

Adanya penetapan indikator Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Bapenda telah menyusun perencanaan yang realistis sekaligus progresif dalam mendorong peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut bahwa Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang juga mengungkapkan pendapatnya yakni “Penyusunan bertujuan untuk membangun sistem digital PBB-P2 yang stabil, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat”.

Hal diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah yang berpendapat bahwa “Penyusunan jangka panjang bertujuan untuk mewujudkan ‘*Smart Fiscal Ecosystem*’ sistem keuangan daerah yang sepenuhnya berbasis data digital, terintegrasi lintas sektor, dan mampu melakukan prediksi penerimaan pajak secara otomatis”. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perencanaan digitalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tangerang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan operasional jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada transformasi sistem pengelolaan pajak daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pembangunan sistem digital yang stabil, terintegrasi, dan mudah diakses mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sementara visi jangka panjang menuju Smart Fiscal Ecosystem menunjukkan adanya orientasi strategis berbasis data dan integrasi lintas sektor.

Selain perencanaan yang baik, keterlibatan stakeholder seperti perbankan, *marketplace*, dan penyedia aplikasi dalam perencanaan sistem pembayaran elektronik juga patut diperhatikan sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlibatan para pemangku kepentingan tersebut memungkinkan terbangunnya sistem pembayaran yang kompatibel, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus memastikan integrasi teknis dan operasional antarplatform. Dalam perspektif teori efektivitas Siagian, kolaborasi lintas stakeholder mencerminkan kesesuaian strategi pelaksanaan dengan kondisi lingkungan organisasi serta pemanfaatan sumber daya eksternal secara optimal. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan stakeholder terkait, implementasi sistem pembayaran elektronik PBB-P2 diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah menegaskan bahwa:

“Keberhasilan digitalisasi pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Kabupaten Tangerang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga pada keterlibatan aktif para *stakeholder* eksternal seperti bank daerah, penyedia layanan pembayaran digital, *marketplace*, dan penyedia aplikasi *e-government*”.

Sejalan dengan hal tersebut Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang berpendapat bahwa “Keterlibatan *stakeholder* dalam sistem pembayaran PBB-P2 elektronik di Kabupaten Tangerang

dilaksanakan melalui model *Public-Private Collaboration (PPC)*, yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam mendesain, mengimplementasikan, dan mengawasi sistem digital pajak daerah”.

Kutipan diatas menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tangerang dilaksanakan melalui pola kolaborasi yang terstruktur dan strategis antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Model *Public-Private Collaboration (PPC)* menegaskan bahwa keterlibatan stakeholder eksternal tidak bersifat insidental, melainkan terintegrasi sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga pengawasan sistem pembayaran elektronik. Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah menegaskan bahwa “Tentunya keterlibatan stakeholder sangat penting terutama dalam mencapai tujuan yakni meningkatkan aksesibilitas pembayaran pajak; menjamin transparansi dan akuntabilitas fiskal; menyediakan layanan berbasis teknologi yang andal dan aman”.

Penyusunan Program

Program dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan terencana dan terkoordinasi yang dirancang oleh pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kabupaten Tangerang, untuk mengimplementasikan kebijakan pembayaran PBB-P2 secara elektronik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Program ini mencakup perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sistem, sosialisasi kepada wajib pajak, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Program sosialisasi apa saja yang disusun untuk menjawab kebutuhan wajib pajak terkait pembayaran elektronik. Merujuk pada permasalahan tersebut Kepala Bapenda Kab. Tangerang menegaskan bahwa “Keberhasilan digitalisasi pembayaran PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Kabupaten Tangerang sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu melakukan sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan kepada wajib pajak”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program sosialisasi dipandang sebagai komponen strategis dan krusial dalam keberhasilan implementasi pembayaran PBB-P2 secara elektronik di Kabupaten Tangerang. Sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman, kepercayaan, dan kesiapan wajib pajak dalam beralih dari sistem pembayaran manual ke sistem elektronik. Penjelasan tersebut dipertegas oleh pernyataan Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tangerang mengemukakan pendapatnya bahwa “Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyusun serangkaian program sosialisasi dan edukasi publik yang dirancang secara teknis untuk menjawab kebutuhan wajib pajak terhadap sistem pembayaran PBB-P2 elektronik”.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa program sosialisasi dan edukasi pembayaran PBB-P2 secara elektronik di Kabupaten Tangerang tidak disusun secara umum dan seremonial, melainkan dirancang secara teknis dan terarah untuk menjawab kebutuhan nyata wajib pajak. Perancangan program yang berbasis kebutuhan tersebut menunjukkan adanya upaya penyesuaian antara kebijakan dan kondisi masyarakat sebagai sasaran program, sehingga materi, metode, dan media sosialisasi dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh wajib pajak. Sejalan

dengan hal tersebut Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Pendapatan Daerah menjelaskan bahwa “Sosialisasi digital diarahkan untuk memperluas jangkauan wajib pajak, terutama generasi muda dan masyarakat perkotaan”.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Penggunaan Transaksi Elektronik PBB-P2 dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tangerang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kejelasan tujuan, penggunaan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang pada dasarnya telah memiliki arah kebijakan yang jelas, yaitu mempermudah pelayanan perpajakan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan tersebut tercantum dalam perencanaan daerah dan telah dipahami oleh aparaturnya pelaksana, namun belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh wajib pajak. Kondisi ini tercermin dari masih tingginya piutang PBB-P2, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan, sehingga kejelasan tujuan perlu diperkuat melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih intensif agar penerapan transaksi elektronik benar-benar mendukung peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Strategi pencapaian tujuan dalam penerapan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang telah dirumuskan secara jelas dan dijalankan secara konsisten. Bapenda tidak hanya menitikberatkan pada penguatan sistem digital, tetapi juga mengombinasikannya dengan pendekatan sosialisasi, edukasi, dan kemitraan lintas sektor. Kejelasan strategi ini tercermin dari keselarasan antara langkah kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan peningkatan penerimaan PAD dari sektor PBB-P2, yang menandakan bahwa strategi tersebut dipahami oleh aparaturnya sekaligus diterima oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Perumusan kebijakan transaksi elektronik PBB-P2 di Kabupaten Tangerang telah dilakukan secara terencana dan berbasis kebutuhan nyata. Kebijakan disusun melalui analisis terhadap kelemahan sistem manual, evaluasi empiris, serta pembelajaran dari praktik daerah lain, sehingga keputusan yang diambil bersifat rasional dan kontekstual. Dukungan regulasi yang jelas serta mekanisme umpan balik masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi PAD.

Daftar Pustaka

- Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi (PT Rineka Cipta, 2003)
- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, 1st ed. (Graha Ilmu, 2011)
- Amin, *Memahami Keuangan Daerah* (Indomedia Pustaka, 2017)
- Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Badan Pendapatan Daerah, *RANCANGAN AKHIR RENSTRA BAPENDA 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rancangan Akhir* (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2025)
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Bevir, M. *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Dewi, Shinta, *Cyberlaw 1: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam e-Commerce Menurut Hukum Internasional*, 1st ed. (Widya Padjadjaran, 2009)

- Djaenuri, Aries, *HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH : Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, 1st ed. (Ghalia Indonesia, 2012).
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Dwiyanto, A. *Tata Kelola Pemerintahan Adaptif: Inovasi Dan Transformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
- Fountain, J. E. *Building the Virtual State: Information Technology and Institutional Change*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 2001.
- Gibson, Ivancevich, dan Donnely. *Organisasi: perilaku, struktur, proses*. 5 ed. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Gunadi, Sugianto, dan D Wahyu Nuryanto. *Pajak 4.0*. PT. Gramedia Printing, 2019.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Optik Hukum: Peraturan Daerah Bermasalah: Menggagas Peraturan Daerah yang Responsif dan Berkesinambungan*, 1 (Prestasi Pustaka, 2011)
- Hunter, J. S. H. *Federalism and Fiscal Balance: A Comparative Study*. Australia: Australian National University Press, 1977.
- Indrajit, R. *E-Government for Development*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Belanja Daerah* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.)
- Komdigi, *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024* (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024) <https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/02122024_Buku%20IMDI_BAB%201-5_V6_compressed.pdf>
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. 13 ed. Vol. 1. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jogiyanto. *Sistem Informasi Keperilakuan*. 1 ed. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- , *Perpajakan*, 1st edn (CV Andi Offset, 2023)
- Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah: Perspektif Ability and Power Leadership* (Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI), 2018)
- Ndraha, T. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Nugroho, Riant. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Nurhayati, Nurhayati, Apriyanto Apriyanto, Jabal Ahsan, dan Nurul Hidayah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jambi: PT. SonPedia Publishing Indonesia, 2024.
- OECD. *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. OECD Economic Surveys: Indonesia. OECD, 2021. <https://doi.org/10.1787/fd7e6249-en>.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022*, Catatan atas Laporan Keuangan (Pemerintah Kabupaten Tangerang, 2023)
- Rasyid, M. R. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2000.
- Sari, Diana, *Konsep dasar perpajakan*, 1st ed. (Refika Aditama, 2011)
- Sembiring, Tamaulina Br, and others, *Sistem Pemerintah Daerah* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, 2014.

- Sinaga, Womsiter, Marja Sinurat, and Tumpak H Simanjuntak, *Sinergi Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah Konsep, Aplikasi Dan Empiris*, Cet. 1 (Pustaka Rahmat, 2025)
- Sinurat, Marja, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Ghalia Indonesia, 2018)
- Sitepu, Andres Putranta, and others, *Keuangan Daerah* (CV. Azka Pustaka, 2023)
- Soemitro, *Akuntansi Pajak, Edisi Revisi* (Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2015)
- Wirutomo, Paulus, and others, *Paradigma Pembangunan Di Era Otonomi Daerah: Memanusiakan Manusia* (CV. Cipruy, 2003)
- Adetoritse, Daniel, 'Conceptualizing Local Government from a Multi-Dimensional Perspective', *CSCanada.Net: E-Journals*, 1.1 (2011), pp. 66-71, doi:10.3968/j.hess.1927024020110101.093
- Amalia, Rizki Fitri, 'Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang', *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)*, 4.2 (2020), p. 540, doi:10.33395/owner.v4i2.238
- Anggraini, Nur, and Eva Herianti, 'Determinan Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Pekerja Bebas Di Tangerang Selatan', *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10.1 (2022), pp. 113-22, doi:10.37641/jiakes.v10i1.1201
- Aristi, Vinia Tiara, Titin Ruliana, and Ida Rahmawati, *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT. Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kota Samarinda Tahun 2016 - 2018*, 10.2 (2021), pp. 1-8, doi:<https://doi.org/10.31293/ekm.v10i2.5738>
- Bapenda, *Prestasi Dan Proyeksi: TP2DD Tangerang Hadirkan Solusi Digital Berkelanjutan*, (Tigaraksa), 2 June 2025 <<https://bapenda.tangerangkab.go.id/detail-berita/prestasi-dan-proyeksi-tp2dd-tangerang-hadirkan-solusi-digital-berkelanjutan>>
- Barlian, Arya Fattawali, and others, *Optimalisasi Peran Danton untuk Meningkatkan Keterampilan Anggota Dalam Penggelaran Latihan Sistem Berita guna Mendukung Tugas di Yonarhanud 15/DBY*, 11.2 (2024), pp. 254-74, doi:<https://doi.org/10.63824/jtep.v11i2.200>
- Dahiri, M.L, 'Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Ternate Utara Dalam Sistem Pelayanan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah', *JUSTISIA - JURNAL ILMU HUKUM*, 7.14 (2020)
- Deslina, *Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 2022*, 26 January 2024 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html>> [accessed 5 February 2025]
- Effendi, Fauzan, Vince Ratnawati, and Yesi Mutia Basri, 'Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah', *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4.2 (2021), pp. 95-116, doi:10.18196/jati.v4i2.10394
- Fadli, Muhammad Farid, 'Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat', *Repository IPDN*, 2022, pp. 1-20
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), pp. 33-54, doi:10.21831/hum.v21i1.38075

- Fauzia, Mutia, and Bambang P Jatmiko, 'BI, Pemerintah, Dan Pemda Dorong Elektronifikasi Transaksi Keuangan', *Kompas* (Jakarta), 2019 <<https://money.kompas.com/read/2019/05/28/200242826/bi-pemerintah-dan-pemda-dorong-elektronifikasi-transaksi-keuangan?page=all>>
- Febriaty, Hastina, *Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Era Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, 2019, pp. 306–13
- Fenny, Sintia, 'Transformasi Pemerintahan Digital Melalui Penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi' (Universitas Jambi, 2024) <<https://repository.unja.ac.id/>>
- Fitran Sah, Novi Winarti, and Ardi Putra, 'Efektivitas Program E-Payment One Stop Service Dalam Menunjang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Karimun', *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3.1 (2024), pp. 101–18, doi:10.47861/tuturan.v3i1.1467
- Gatot Efrianto and Nia Tresnawaty, 'Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan Dan Pengalaman Terhadap Penggunaan Fintech Di Kalangan Masyarakat Kabupaten Tangerang Banten', *Jurnal Liabilitas*, 6.1 (2021), pp. 53–72, doi:10.54964/liabilitas.v6i1.71
- Handayani, Witiya Tri, and Sigit Santoso, 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta', *Jupe UNS*, 2.3 (2014), pp. 224–37
- Hariandja, Fernando, 'Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi', *Jurnal Suara Hukum*, 2.2 (2020), p. 154, doi:10.26740/jsh.v2n2.p154-183
- Hariyanto, 'Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3.2 (2020), pp. 99–115, doi:10.24090/volksgeist.v3i2.4184
- Hayati, Farkhatul, and Imahda Khoiri Furqon, 'Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17.1 (2025), pp. 130–34, doi:10.55049/jeb.v17i1.406
- Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, and Robert M. Marbun, 'Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Jayapura', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)*, 2.1 (2017), doi:10.52062/keuda.v2i1.716
- Irianti, Ervita Tri, and Fitrotun Niswah, 'Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik', *Publika*, 14 August 2021, pp. 503–14, doi:10.26740/publika.v9n4.p503-514
- Irmawati, Madani Muhlis, and Anwar Parawangi, *Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Taman Purbakala Batu Pake Gojeng di Kabupaten Sinjai*, 5 (2019), pp. 112–27
- Ishwor Thapa, 'Local Government: Concept, Roles and Importance for Contemporary Society.', *Public Administration Campus*, 2020, p. 1, doi:10.13140/RG.2.2.23009.33123
- Isnaeni, Diyan, 'Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014', *Yurispruden*, 1.1 (2018), p. 35, doi:10.33474/yur.v1i1.734

- Kautsar, Muhammad Ziddane Al, and Asep Hidayat, 'Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang', *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 20.3 (2022)
- Komdigi, *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024* (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2024) <https://imdi.sdmdigital.id/publikasi/02122024_Buku%20IMDI_BAB%201-5_V6_compressed.pdf>
- Kurniawan, Alek, and others, 'Strategi Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan (Analisis di Kota Pekanbaru)', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8.1 (2024), p. 962, doi:10.33087/ekonomis.v8i1.1825
- Kustianingsih, Nurafni, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah*, 6.6 (2018), pp. 82-91
- Lauwrenza, Valencia, and others, 'Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tangerang', *Jurnal Pajak Indonesia*, 7.1 (2023), pp. 37-44
- Lumbanbatu, Rheinhard, Thobby Wakarmamu, and Transna Putra Urip, 'Analisis Struktur Dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merauke', *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 5.2 (2018), doi:10.56076/jkesp.v5i2.2114
- Muin, Fatkhul, 'Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2015), doi:10.25041/fiatjustisia.v8no1.288
- Mulia, Rizki Afri, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat)', *Jurnal EL-RIYASAH*, 9.1 (2019), p. 7, doi:10.24014/jel.v9i1.6798
- Nasir, Muhammad Safar, 'Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah', *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN*, 2.1 (2019), p. 30, doi:10.14710/jdep.2.1.30-45
- Nurhasanah, and Maria, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bengkulu', *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1.1 (2017), pp. 60-73, doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.3840873>
- Nurlaelah, and Rr. Prima Dita Hapsari, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang 2014-2018', *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis (The Indonesian Journal of Management & Accounting)*, 10.1 (2022), pp. 31-38, doi:10.55171/jsab.v10i1.707
- Pujiati, Amin, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*, 13.2 (2008), pp. 61-70, doi:10.20885/vol13iss2aa221
- Pusposari, Devy, and others, 'Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) & NPWP 16 Digit', *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4.5 (2023), pp. 257-62, doi:<http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5.2448>
- Putra, Teguh Firzana, 'Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Aceh' (UIN Ar-Raniry, 2023)

- Rahmat Yusran, Rio, and Dian Lestari Siregar, 'Pengaruh BPHTB Dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau', *Jurnal AKRAB JUARA*, 2.3 (2017), pp. 73–84
- Ramdanti, Elma Rizki, Ruslaini, and Abidzar, 'Persepsi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS (Studi Kasus: Pasar Induk Tamin, Kota Bandar Lampung)', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10.7 (2023), pp. 3330–37
- Rosmida, Rosmida, and Julaidah Julaidah, 'Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 – 2019', *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2.1 (2021), p. 104, doi:10.35314/iakp.v2i1.1920
- Sianturi, Anastasia, Sjamsiar Sjamsuddin, and Tjahjanulin Domai, *Peran Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu)*, 2.3 (2014), pp. 557–63
- Steers, Richard M., 'Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment', *Administrative Science Quarterly*, 22.1 (1977), p. 46, doi:10.2307/2391745
- Triarda, Reza, and Ratnaningsih Damayanti, 'Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.1 (2021), pp. 35–54, doi:10.14710/jiip.v6i1.9350
- UNESCO, *A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2*, 51 (UNESCO Institute for Statistics, 2018) <<https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf>>
- Utari Handayani, Tri, and Erinoss Nr, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating', *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2.1 (2020), pp. 2348–61, doi:10.24036/jea.v2i1.216
- Wafa, Mohammad Azimul, and Imahda Khoiri Furqon, 'Peran Sistem Informasi Pelayanan Pembayaran Pajak dalam Meningkatkan Efektivitas Wajib Pajak', *'LAWSUIT' Jurnal Perpajakan*, 3.2 (2024), pp. 125–32, doi:10.30656/lawsuit.v3i2.9827
- Yuliyanti, Leni, Nugraha Nugraha, and Yanyan Kurnia Fadilah, 'The Influence of Local Own-Source Revenue towards Regional Financial Independence', unpublished paper delivered at Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018) (Bandung, Indonesia, 2019), *Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*, doi:10.2991/icebef-18.2019.2
- Yusuf, Ahmad Mudhofar, Ahmad Fatkhur Rozi, and Mohammad Aqil Muhaimin, 'Perancangan Sistem Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan', 3 (2024), doi:<https://doi.org/10.29407/stains.v3i1.4255>